



Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mewujudkan Lulusan yang Unggul

Ariska Gania Rahma¹, Endang Sutrisno², Nursahidin³

Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Email: ariskaganifa@gmail.com

**Correspondence: Ariska Gania Rahma*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengkaji solusi yang dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Indramayu. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBKM belum berjalan optimal, dengan kendala utama berupa keterbatasan anggaran, infrastruktur, sumber daya manusia, serta rendahnya motivasi mahasiswa. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran, sosialisasi program, dan penyediaan fasilitas pendukung. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi dan dukungan kelembagaan untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, MBKM, STIKes Indramayu, kendala, solusi

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Independent Campus (MBKM) policy, identify its challenges, and explore the efforts made at the Indramayu College of Health Sciences. A descriptive qualitative approach was used, employing literature review, observation, interviews, and documentation. The policy implementation framework by Van Meter and Van Horn guided the analysis. Findings indicate that MBKM implementation remains suboptimal due to budget limitations, inadequate infrastructure, human resource constraints, and low student motivation. Improvement strategies include increased funding, program outreach, and facility enhancements. The study recommends stronger institutional coordination and support to enhance policy effectiveness.

Keywords: Policy implementation, MBKM, STIKes Indramayu, challenges, solutions

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi di Indonesia kini menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai strategi utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mutu pendidikan nasional (Kholik et al., 2022). Program ini lahir sebagai inovasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024. Tujuannya adalah mentransformasi sistem pendidikan tinggi agar mampu melahirkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja (pemerintah, 2022). MBKM dirancang sebagai kerangka penguatan kompetensi mahasiswa agar mampu menjadi sarjana yang tidak hanya tangguh, tetapi juga relevan dengan dinamika global serta memiliki semangat kebangsaan yang

tinggi. Dukungan terhadap kebijakan ini semakin kuat dengan terbitnya Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran lintas program studi selama tiga semester (Rahmat & Rudi, 2023; Tantowi, 2022).

Dalam praktiknya, MBKM mencakup berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar lingkungan kampus, seperti magang atau praktik kerja di dunia industri, proyek pengabdian masyarakat, program mengajar di satuan pendidikan, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, dan keterlibatan dalam program kemanusiaan. Seluruh kegiatan tersebut harus dilaksanakan di bawah pendampingan dosen sebagai bagian dari sistem akademik. Transformasi ini bermula pada tahun 2020, saat Mendikbud Nadiem Makarim menggagas perubahan dari Kurikulum 2013 ke arah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam hal ini, Merdeka Belajar dimaknai sebagai kebebasan dalam berpikir dan berinovasi, sedangkan Kampus Merdeka merupakan kelanjutannya dalam konteks pendidikan tinggi (Aufaa & Andaryani, 2023; Rahma et al., 2023; Vhalery et al., 2022; Ainia, 2020).

Perubahan kurikulum ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan selaras dengan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila (Amalia & Asbari, 2023; Ni'am et al., 2022; Sumandya, 2022). Hal ini juga sejalan dengan pandangan World Economic Forum (2016) yang mengidentifikasi 16 keterampilan penting abad ke-21, yang terbagi ke dalam literasi dasar, kompetensi, dan karakter. Pendidikan tinggi diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan keterampilan ini sebagai respons terhadap percepatan perubahan sosial, budaya, dan teknologi (Lase, 2019).

Untuk itu, perguruan tinggi perlu merancang proses pembelajaran yang inovatif agar dapat menunjang pencapaian hasil belajar mahasiswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara maksimal, sekaligus sesuai dengan kerangka MBKM. Kurikulum ini ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas mahasiswa secara menyeluruh agar siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun menciptakan lapangan kerja baru. Sistem pembelajaran dalam MBKM dirancang berpusat pada mahasiswa, salah satunya melalui program magang yang menjadi wujud nyata penerapan konsep *link and match* antara dunia pendidikan dan industri (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Lebih dari sekadar proses transfer pengetahuan, kegiatan MBKM memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengembangkan daya cipta, keterampilan kolaboratif, pengelolaan diri, serta kemampuan menghadapi tantangan riil di lapangan. Melalui implementasi program yang sistematis dan berkelanjutan, MBKM diharapkan dapat membentuk keseimbangan antara penguasaan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa yang akan sangat dibutuhkan di dunia profesional masa depan.

Kabupaten Indramayu memiliki beberapa perguruan tinggi diantaranya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu. Dimana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu ini memiliki 5 program studi, antara lain Program Studi Sarjana Keperawatan, Program Studi Sarjana Kebidanan, Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan serta Sarjana Kesehatan Masyarakat. Program Studi yang tidak dapat mengikuti Program MBKM meliputi Sarjana Keperawatan, Kebidanan, Profesi Ners serta Pendidikan Profesi Bidan. Akan Tetapi hanya Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang dapat mengikuti Program MBKM ini. dimana ada 6 mahasiswa yang masuk dalam program MBKM ini. Mereka melakukan tahapan pendaftaran dan seleksi terlebih dahulu. Disini dari beberapa program yang telah dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu hanya mengikuti Program Pertukaran Pelajar di Universitas Prima Medan dan Program Mengajar di satuan pendidikan di Sekolah Dasar di Indramayu antara lain: SD N Wanasari 2 (Bangodua

Indramayu), SD 1 Tegalsembadra (Balongan Indramayu), dan SD N 1 Tinumpuk (Juntinyuat Indramayu). Disini di Sekolah Tinggi Kesehatan Indramayu, mahasiswa Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat tidak tertarik atau kurang mendukung untuk mencoba di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) lainnya. Mereka mengikuti jejak kakak tingkat nya mengambil program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari permasalahan tersebut penulis mengambil judul Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Untuk Mewujudkan Lulusan yang Unggul Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu.

Penelitian terdahulu oleh Puspitasari & Nugroho (2021a) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan MBKM di lingkungan FISIP UPN Veteran Jawa Timur menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif, seperti sulitnya konversi mata kuliah, kurangnya mitra kerja sama, dan sistem informasi akademik yang belum siap. Sementara itu, penelitian oleh Sintiawati et al. (2022) menyoroti keterbatasan pendanaan, minimnya SDM yang kompeten, dan kurangnya informasi menyeluruh sebagai hambatan besar dalam pelaksanaan MBKM. Kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada tingkat kebijakan dan struktur institusional secara umum, namun belum menysasar secara spesifik pada dinamika implementasi MBKM di institusi pendidikan tinggi kesehatan dengan karakteristik profesi seperti STIKes Indramayu (Puspitasari & Nugroho, 2021b).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengisi gap tersebut, yaitu dengan mengeksplorasi implementasi MBKM pada program studi non-profesi (S1 Kesehatan Masyarakat) di institusi kesehatan, yang secara umum memiliki keterbatasan dalam menjalankan delapan bentuk kegiatan MBKM. Fokus pada partisipasi terbatas mahasiswa, resistensi terhadap program non-tradisional, dan kecenderungan untuk mengikuti pola senior menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan perguruan tinggi umum. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana MBKM dijalankan dan diterima di institusi pendidikan berbasis kesehatan serta memberikan gambaran kontekstual mengenai peluang dan tantangan yang lebih spesifik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu, khususnya pada Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan tinggi berbasis profesi dan non-profesi, memperkaya kajian implementasi MBKM pada konteks institusi kesehatan, serta memberikan rekomendasi praktis kepada pemangku kepentingan pendidikan agar lebih adaptif dan inklusif dalam mendorong partisipasi mahasiswa terhadap program MBKM.

METODE

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu, dengan subjek utama mahasiswa Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 sebagai kerangka dasar kurikulum nasional. Model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan dikutip dalam Arikunto (2008), untuk menilai keseluruhan pelaksanaan kebijakan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria utama yaitu mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan Kampus Mengajar. Informan tambahan terdiri dari Wakil Ketua Bidang Akademik, Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat,

serta dosen pembimbing program MBKM. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data primer, sementara observasi, studi literatur, dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data pendukung.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan Spradley (dalam Moleong, 2014), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini didukung logika induktif, deduktif, dan komparatif (Suproyogo & Tabroni, 2011) guna menyusun interpretasi terhadap temuan lapangan secara sistematis dan tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum lokasi penelitian

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu dibawah naungan Yayasan Indra Husada yang berdiri sejak tahun 2002 sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Kesehatan menyelenggarakan 2 (dua) Program studi yaitu Program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Sarjana Keperawatan. Sejalan dengan perkembangannya pada tahun 2004 membuka program studi baru yaitu Diploma III Kebidanan dan tahun 2008 Program Studi Profesi Ners. Pada Tahun 2019 kami menutup Proram Studi Diploma III (tiga) Kebidanan dan membuka Program Studi baru yakni Program studi Sarjana Kebidanan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan.

Pembahasan

Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan untuk Mewujudkan Lulusan yang Unggul di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu

Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan adalah bagian dari kerangka kerja yang lebih luas tentang analisis kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn seorang ahli kebijakan publik, berkontribusi signifikan dalam pemahaman tentang proses implementasi kebijakan melalui pendekatan analisis yang komprehensif. Implementasi kebijakan adalah tahap dalam siklus kebijakan di mana keputusan yang telah diambil diimplementasikan dalam praktik. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya sekadar pelaksanaan keputusan yang telah dibuat, tetapi melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai aktor, institusi, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi hasil dari kebijakan tersebut. Dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn ada 5 yaitu :

Kejelasan Tujuan dan Sasaran

Dimensi kejelasan tujuan dan sasaran memiliki 3 parameter yaitu : Spesifik dan terukur, konsistensi, dan Pemahaman oleh pelaksana. Parameter konsistensi yang di dapat dari berbagai informan sudah efektif. Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Komitmen mahasiswa untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah bagus, dalam hal ini informan merasa cukup konsisten dalam pelaksanaan program. Pada

parameter pemahaman oleh pelaksana kondisi yang ada mahasiswa telah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka penulis menyimpulkan bahwa pada parameter pemahaman oleh pelaksana sudah efektif. Dimensi kejelasan dan tujuan sangat penting dalam rangka tercapainya suatu implementasi kebijakan. Analisis dimensi kejelasan dan tujuan dalam implementasi kebijakan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, disini pihak tersebut mahasiswa program Kampus Mengajar Merdeka dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Kondisi yang ada saat ini sudah efektif karena definisi tujuan sudah jelas, sesuai yang tertulis di akun Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merasa lolos dan mampu bergabung dengan teman lainnya dalam program yang dituju.

Dimensi sumber yang tersedia memiliki 3 parameter yaitu : anggaran, sumber daya manusia dan infrastruktur. Anggaran pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sempat menjadi kendala, dikarenakan keterlambatan dan tidak diterimanya Bantuan Hidup Dosen Pembimbing Lapangan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini menjadikan hambatan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Berdasarkan analisis diatas maka penulis simpulkan bahwa pada dimensi sumberdaya dinyatakan belum efektif. Parameter infrastruktur belum efektif karena kelas yang belum nyaman, jumlah Infokus dan jaringan internet yang kurang memadai. Mahasiswa dan dosen merasa terbatasnya jumlah kelas dan tidak seimbangny jumlah infokus yang kurang memadai.

Komitmen dari Pelaksana Kebijakan

Dimensi Komitmen dari Pelaksana Kebijakan memiliki 3 parameter yaitu : motivasi, kepemimpinan dan disiplin. Dalam Parameter Motivasi ini mahasiswa Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat memiliki motivasi yang rendah. Mahasiswa Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat hanya 6 orang yang mampu lolos dalam program MBKM ini. mereka yang lolos dalam program ini memiliki pengalaman, dorongan untuk belajar hal baru, bersosial dan lingkungan yang baru, belajar kerjasama dan pengakuan diri ditempat asing, yang nantinya akan dirasakan di dunia kerja. Dari Parameter Kepemimpinan yang penulis simpulkan Kepemimpinan yang partisipatif dan inovatif yang mampu menciptakan loyalitas, dan partisipasi dari bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar meras ikut memiliki perusahaan atau organisasi. Parameter Disiplin dari dimensi Komitmen pelaksana yang penulis simpulkan disiplin yang mematuhi peraturan yang berlaku dan mengikuti tata tertib yan ada. Sehingga mahasiswa mampu berjalan di arah yang benar dan tinggal diarahkan ke yang lebih baik dan siap menjadi lulusan yang unggul sesuai dengan bidangnya. Pada Dimensi Komitmen Pelaksana Kebijakan merupakan komitmen untuk menerapkan kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah. Komitmen ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut, antara lain : Mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku, menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang, menyediakan sumber daya yang cukup, memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan.

Lingkungan Implementasi

Dimensi Lingkungan Implementasi (Environment) dari Pelaksana Kebijakan memiliki 3 parameter yaitu : stabilitas Politik, kondisi Sosial – ekonomi dan dukungan masyarakat. Parameter Kondisi Sosial – ekonomi dengan beberapa informan dapat penulis simpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat pada umumnya, dirasa kurang baik. Terbukti bahwa orangtua menginginkan pendidikan anaknya yang lebih tinggi dan dengan minim penghasilan masih menggantungkan adanya beasiswa, dan bantuan dari pemerintah. Banyaknya kriminalitas, pengangguran dan inflasi yang tinggi. Lingkungan Implementasi merupakan lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan. Lingkungan implementasi dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Lingkungan implementasi mempunyai tiga parameter antara lain : stabilitas politik, kondisi sosial - ekonomi dan dukungan masyarakat. Stabilitas politik saat ini dirasa efektif, adanya peraturan dari pemerintah, masyarakat mampu melaksanakan kebijakan. Kondisi Sosial -ekonomi pada masyarakat Indonesia dirasa kurang, mayoritas kondisi Ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: pendidikan, pendapatan, status dalam keluarga, kesehatan, jabatan dalam organisasi dan dukungan masyarakat.

Koordinasi antar aktor

Dimensi Koordinasi Antar Aktor, memiliki 3 parameter yaitu : kolaborasi, komunikasi, dan pembagian peran. Dalam Parameter Kolaborasi dengan beberapa informan dapat penulis simpulkan bahwa kolaborasi yang terjadi pada kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terjadi antara mahasiswa dengan guru dan kepala sekolah, cukup baik. dalam program ini, mahasiswa berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah menyusun strategi pembelajaran yang inovatif. Sehingga mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Dalam Parameter Komunikasi dengan beberapa informan dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung terjalin sangat baik. Dosen pembimbing lapangan dapat mengetahui kegiatan mahasiswa di perguruan Tinggi Universitas Prima Indonesia. Sesama Dosen Pembimbing pun mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi pihak Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan Universitas Prima Indonesia terjalin sangat baik. Dalam Parameter Pembagian Peran dengan beberapa informan dapat penulis simpulkan bahwa Pembagian Peran yang terjadi baik. Dosen pembimbing lapangan dapat mengetahui mahasiswa dapat menjadikan dirinya sebagai guru kelas. Dan membantu guru kelas untuk mengisi mata pelajaran berhitung dan membaca.

Hambatan yang terjadi pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu

Dari Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis hambatan yang terjadi pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah:

- 1). Anggaran yang berupa Bantuan Biaya Hidup terlambat bahkan sampai tidak sampai ke dosen Pembimbing Lapangan Program Pertukaran Mahasiswa. Anggaran untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sangat minim. Pihak Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu juga kurang memprioritaskan anggaran dalam implementasi kebijakan ini.
- 2). Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor penting dalam kebijakan ini. Sumber Daya Manusia disini dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Sumber Daya Manusia di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu tidak semua mengetahui Program tersebut.
- 3). Infrastruktur yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu yaitu : Kurangnya jumlah kelas, terbatasnya infokus, dan akses jaringan yang kurang baik pada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu.
- 4). Motivasi Mahasiswa yang kurang antusias mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Terutama pada Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. kurangnya motivasi baik dari dalam maupun dari dorongan luar, seperti dorongan dari dosen, melakukan tugas dikampus untuk mendapatkan penghargaan eksternal seperti hadiah atau uang.

Upaya mengatasi hambatan pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu

Penulis ambil kesimpulan Upaya Mengatasi hambatan yang telah di hadapi antara lain : Anggaran merupakan hal yang sangat penting. Upaya mengatasi hambatan dalam hal ini anggaran dapat menambah alokasi anggaran untuk kegiatan kebijakan kurikulum. Sumber Daya Manusia yang berhubungan langsung pada program MBKM tidak hanya mahasiswa dan dosen, melainkan juga tenaga kependidikan dimana semuanya mengetahui akan hal program MBKM ini. Upaya untuk mengatasinya dengan cara adanya sosialisasi pada semua unsur kampus, termasuk tenaga kependidikan. Infrastruktur Untuk hal Infrastruktur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu harus menambah infokus untuk pembelajaran mahasiswa dikelas. Akses untuk Internet dalam hal ini tiap kelas atau pun ruangan terdapat alat untuk mengakses internet (Router) sehingga mahasiswa maupun karyawan mampu mengakses Internet dengan leluasa dan untuk menunjang pembelajaran dikampus. Motivasi ekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu memberikan motivasi terutama bagi Dosen dan mahasiswa agar mengikuti kebijakan yang ada.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan lulusan yang unggul. Meskipun kejelasan tujuan program sudah cukup baik dan mahasiswa yang mengikuti program merasa mendapatkan manfaat, kelemahan masih terlihat pada aspek sumber daya manusia yang belum kompeten, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang

kurang memadai, serta kurangnya motivasi dan komitmen dari pelaksana dan mahasiswa. Selain itu, faktor eksternal seperti rendahnya dukungan masyarakat dan lemahnya koordinasi antaraktor juga menjadi penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan MBKM di institusi ini.

Sebagai bentuk perbaikan konkret, perlu dilakukan peningkatan alokasi anggaran khusus untuk mendukung implementasi kebijakan MBKM secara menyeluruh, termasuk dalam penyediaan sarana teknologi dan pelatihan SDM. Pihak kampus juga harus mengoptimalkan sosialisasi kepada seluruh unsur civitas akademika, termasuk tenaga kependidikan dan mahasiswa, agar pemahaman serta dukungan terhadap program ini meningkat. Penambahan infrastruktur seperti perangkat digital (infokus) dan perluasan jaringan internet ke seluruh ruang kelas merupakan langkah teknis yang mendesak. Di sisi lain, penting juga untuk membangun sistem koordinasi yang jelas antarunit pelaksana, agar peran masing-masing aktor dalam implementasi kebijakan menjadi lebih terstruktur dan saling mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, D. (2020). Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hajar Dewantara Dan Relevansinya Bagi Pengembang Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3).
- Amalia, V. R., & Asbari, M. (2023). Merdeka Belajar: Solusi Awal Transformasi Pendidikan Indonesia? *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(5), 62–67.
- Aufaa, M. A., & Andaryani, E. T. (2023). Dampak transformasi pendidikan nasional dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka: Kajian literatur. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(2), 150–156.
- Dirjen Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.
- Dzikria, I., & Narulita, L. (2021). Pengembangan Kurikulum untuk Pembentukan Jurusan Sistem Informasi Untag Surabaya Berbasis Kurikulum MBKM dan ACM IS dengan Metode Kualitatif. *Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer)*, 5, 229–234.
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. (2022). Impelementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berdasarkan persepsi dosen dan mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 738–748.
- Lase, D. (2019). Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 1(1), 28–43.
- Makarim, N. (2020). *Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*.
- Ni'am, M. K., Lia, L., Salsabila, N. A., Fitriyani, N., & Sari, N. H. M. (2022). Pembelajaran matematika berbasis computational thinking di era kurikulum merdeka belajar. *SANTIKA: Seminar Nasional Tadris Matematika*, 2, 66–75.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- pemerintah. (2022). Peningkatan Soft Skill Melalui Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Proyeksi*, 17(1), 112–126.
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021a). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka FisipUpn Veteran Jawa Timur. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 276–292.
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021b). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 58–67. <https://doi.org/10.22146/jsp.63182>
- Rahma, D., Cornelia, O. S., & Noviani, D. (2023). Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(2), 539–550.
- Rahmat, A., & Rudi, A. (2023). Quo Vadis Pendidikan Pesantren Di Era Digital. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 11(1), 99–118.

Ariska Gania Rahma, Endang Sutrisno, Nursahidin

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untuk Mewujudkan Lulusan yang Unggul

- Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M. (2022). Partisipasi Civitas Akademik dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 902–915.
- Sintiawati, N., Izzaty, R. E., & Dewi, M. A. (2022). Analisis implementasi MBKM di perguruan tinggi: Peluang dan tantangan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(2), 105–120. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v12i2.5410>
- Sumandya, I. W. (2022). Link and match konten pelajaran matematika, strategi pembelajaran dan platform merdeka mengajar untuk mewujudkan profil pelajar pancasila. *Prosiding Mahasaraswati Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, 2(1), 35–43.
- Tantowi, H. A. (2022). *Pendidikan Islam di era transformasi global*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum merdeka belajar kampus merdeka: Sebuah kajian literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185–201.